

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 17 No. 3 Desember 2024 Hal. 295- 446

“DISPUTE OF RIGHT”



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Arie Sudihar

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur:

1. Juma'in
2. Dinal Fedrian

Penyunting:

1. Imran (Hukum Pidana)
2. Fajri Nursyamsi (Hukum Tata Negara)
3. Muhammad Ilham (Hukum Administrasi Negara)
4. Ikhsan Azhar (Hukum Tata Negara)
5. Atika Nidyandari (Hukum Dagang)
6. Nurasti Parlina (Hukum Pidana dan Perdata)
7. Rina Susani (Hukum Pidana)

Sekretariat:

1. Priskilla Siregar
2. Noercholysh
3. Wirawan Negoro
4. Didik Prayitno
5. Yuni Yulianita

Desain Grafis

dan Fotografer:

1. Arnis Duwita Purnama
2. Widya Eka Putra

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

Email: jurnal@komisiyudisial.go.id

Website: www.jurnal.komisiyudisial.go.id

“DISPUTE OF RIGHT”

Pembaca Jurnal Yudisial yang budiman, Indonesia baru saja menyelenggarakan helatan Pemilihan Umum yang menghasilkan pucuk pimpinan baru di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Pemimpin negara baru tentu saja membuka harapan baru ke perubahan yang lebih baik bagi jalannya negara, salah satunya di bidang hukum. Ada banyak permasalahan hukum yang masih menjadi pekerjaan rumah dari kepemimpinan yang sebelumnya. Cukup signifikan adalah terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang implikasinya masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Undang-undang tersebut berpengaruh besar terhadap tata kerja ekonomi negara, khususnya dalam hubungan industrial antara buruh dan pengusaha. Dalam Jurnal edisi terakhir di tahun ini, ada beberapa tulisan yang menyinggung tentang perselisihan hak, baik antara individu, maupun antara individu dengan korporasi.

Tulisan pertama mengulas mengenai mediator hubungan industrial dalam sengketa peradilan. Pada tulisan kedua, dibahas mengenai pertimbangan hakim tidak menerima rekonsiliasi dengan alasan konsiliasi telah diterima. Tulisan ketiga mengenai status perjanjian kerja dan pemberi kerja. Tulisan keempat mengenai penelantaran tanah wakaf oleh *nazhir* wakaf. Tulisan kelima membahas pidana koruptor yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara. Sedangkan dua tulisan terakhir membahas tentang permasalahan pidana. Tulisan keenam membahas perlindungan hukum anak yang berkonflik, dan tulisan terakhir memberikan pandangan mengenai perdagangan manusia ke luar wilayah Indonesia.

Ketujuh tulisan di atas diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai penegakan hukum di Indonesia. Membahas penegakan hukum bukan berarti menciptakan sudut pandang negatif bagi negara, namun sebagai bentuk kepedulian para akademisi untuk memberikan masukan dan *insight* mengenai permasalahan hukum negara. Ketujuh naskah tulisan di Jurnal kali ini bisa menjadi bahan bagi pemerintahan yang baru dalam menyusun kebijakan hukum yang baru, dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Akhir kata tim redaksi mengucapkan terima kasih kepada pembaca yang memberikan waktunya untuk membaca Jurnal ini.

Salam, dan selamat membaca.

Tertanda

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

KEWENANGAN MENGADILI ANJURAN TERTULIS MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	295 - 311
Kajian Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.SBY dan Nomor 55/G/2023/PTUN.SBY Muhammad Junaidi Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia	
PENOLAKAN REKONVENSI: KETERKAITAN DENGAN KONVENSI	312 - 329
Kajian Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr Nur Putri Hidayah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia	
PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA KATEGORI PKWTT	330 - 352
Kajian Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr Supriyadi, Andi Intan Purnamasari, & Aminuddin Kasim Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Indonesia	
HAK PENGELOLAAN WAKAF DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NAZHIR	353 - 378
Kajian Putusan Nomor 460/K/AG/2019 Isman, Syamsul Hidayat, & Risdayani Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia	
HUKUMAN MAKSIMAL BAGI KORUPTOR YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA	379 - 402
Kajian Putusan Nomor 50/Pid.SisTPK/2021/PN.Jkt.Pst Diya Ul Akmal Magister Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia	
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGIANAK	403 - 424
Kajian Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg Khalisah Hayatuddin, Saipuddin Zahri, Satria Iman Kurnianda,	

dan Muhamad Sadi Is,
Magister Hukum Muhammadiyah Palembang
dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,
Palembang, Indonesia

MISINTERPRETASI HAKIM DALAM

PERKARA PERDAGANGAN MANUSIA 425 - 446

Kajian Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Adhigama Andre Budiman

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, Indonesia

JURNAL YUDISIAL

p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868

Vol. 17 No. 3 Desember 2024

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Junaidi M (Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia)

Kewenangan Mengadili Anjuran Tertulis Mediator Hubungan Industrial

Kajian Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.SBY dan 55/G/2023/PTUN.SBY

Jurnal Yudisial 2024 17(3), 295-311

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.SBY dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 55/G/2023/PTUN.SBY, yang menyatakan tidak berwenang memeriksa sengketa terkait anjuran tertulis mediator hubungan industrial, menimbulkan permasalahan dalam konteks pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Sikap tersebut bertentangan dengan prinsip dasar peradilan bahwa pengadilan tidak diperkenankan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan hukum tidak tersedia atau belum jelas. Sebaliknya, pengadilan berkewajiban menjalankan fungsinya demi menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi para pencari keadilan. Penelitian ini mengkaji kewenangan absolut lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam menangani gugatan terhadap anjuran tertulis yang diterbitkan oleh mediator hubungan industrial. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kejelasan yuridis mengenai kompetensi peradilan dalam menyelesaikan sengketa dimaksud. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anjuran tertulis dari mediator hubungan industrial diatur dalam kerangka hukum hubungan industrial, penerbitannya merupakan tindakan administratif dalam ranah tata usaha negara. Anjuran tersebut bukan merupakan putusan yudisial, melainkan produk administratif dari pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, apabila terdapat pihak yang keberatan terhadap isi anjuran tersebut, upaya hukum yang tepat adalah melalui gugatan

ke PTUN, bukan ke PHI. Temuan ini menegaskan pentingnya kejelasan batas kewenangan peradilan guna menghindari kekeliruan yurisdiksi dan memastikan perlindungan hak-hak para pencari keadilan.

(Muhammad Junaidi)

Kata kunci: anjuran tertulis; mediator hubungan industrial; kompetensi absolut; perselisihan kewenangan.

Hidayah NP (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia)

Penolakan Rekonvensi: Keterkaitan dengan Konvensi

Kajian Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr

Jurnal Yudisial 2024 17(3), 312-329

Tujuan penulisan ini adalah menganalisis putusan hakim pada perkara gugatan wanprestasi yang pada intinya tidak menerima/*niet ontvankelijke verklaard* gugatan rekonvensi tergugat dengan alasan perihal gugatan berbeda dengan gugatan konvensi dan/atau karena gugatan konvensi dikabulkan majelis hakim. Kata ‘dan/atau’ digunakan karena pertimbangan yang tidak secara tegas menyatakan dasar rekonvensi tidak diterima. Penelitian ini berangkat dari ketidakjelasan dasar hukum dalam bagian pertimbangan hakim untuk tidak menerima gugatan rekonvensi tersebut yang dianggap tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan maupun doktrin para ahli terkait hukum acara perdata. Rumusan masalah penulisan ini adalah bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak diterima/*niet onvankelijke verklaad* untuk rekonvensi pada Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus terkait ketentuan rekonvensi dalam hukum acara perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menolak gugatan rekonvensi dengan alasan telah dikabulkannya gugatan konvensi, dan tidak disertai dasar hukum,

baik dalam bentuk ketentuan peraturan perundangan maupun doktrin para ahli. Padahal, antara konvensi dan rekonvensi merupakan gugatan yang saling berdiri sendiri, tidak asesoir, dan eksistensinya untuk mendukung asas beracara sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta menghindari putusan yang saling bertolak belakang. Selain itu, seharusnya hakim menguraikan dasar penolakan dalam pertimbangan hukumnya, mengingat salah satu prinsip dalam hukum acara perdata adalah putusan harus memuat dasar putusan yang jelas dan rinci. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam perkara a quo belum mencerminkan penerapan prinsip hukum acara perdata secara utuh, khususnya terkait eksistensi rekonvensi sebagai perwujudan asas beracara sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta sebagai mekanisme untuk mencegah lahirnya putusan yang saling bertolak belakang. (Nur Putri Hidayah) Kata kunci: konvensi; rekonvensi; gabungan gugatan.	juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan fakta hukum, dan pendekatan studi kasus (<i>case study</i>) untuk menemukan pengaturan prospektif berkaitan dengan konsep PKWTT melalui penalaran hakim dan konsep <i>concurrent opinion</i> dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan realisme hukum dalam menilai fakta. Peristiwa hukum yang terjadi antara pemberi kerja dan penerima kerja dalam perjanjian kerja merupakan pekerjaan yang termasuk dalam kategori PKWTT, bukan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Perbedaan pertimbangan dari hakim anggota kedua nampaknya bukan merupakan <i>dissenting opinion</i> melainkan <i>concurrent opinion</i>. Hakim anggota kedua memiliki kesamaan pandangan dengan majelis hakim lainnya dalam menafsirkan bahwa hubungan kerja yang terjadi merupakan PKWTT, bukan PKWT. Namun demikian, perbedaan pendapat muncul terkait besaran upah proses yang dinilai layak untuk dibayarkan kepada pekerja.
Supriyadi, Purnamasari AI, & Kasim A (Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Indonesia) Pertimbangan Hukum dalam Perjanjian Kerja Kategori PKWTT Kajian Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr <i>Jurnal Yudisial</i> 2024 17(3), 330-352 Artikel ini menganalisis Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr untuk menilai ketepatan dan aspek keadilan dari pertimbangan hukum oleh majelis hakim. Analisis menggunakan pendekatan analisis teks dalam putusan yang berfokus pada hukum acara, penalaran hukum, dan kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan amar putusan. Untuk memfokuskan analisis terhadap putusan ini, dirumuskan pertanyaan utama yang menjadi landasan kajian, yaitu: <i>pertama</i>, apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 47/Pdt. Sus-PHI/2018/PN.Pbr sudah tepat dan sudah memenuhi aspek keadilan terhadap karyawan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT); <i>kedua</i>, mengapa pendapat berbeda dalam putusan tersebut merupakan <i>concurring opinion</i>. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini	(Supriyadi, Andi Intan Purnamasari, & Aminuddin Kasim) Kata kunci: <i>concurrent opinion</i>; perjanjian kerja waktu tidak tertentu; perjanjian kerja waktu tertentu; upah proses. Isman, Hidayat S, & Risdayani (Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia) Hak Pengelolaan Wakaf dan Pertanggungjawaban Hukum Nazhir Kajian Putusan Nomor 460/K/AG/2019 <i>Jurnal Yudisial</i> 2024 17(3), 353-378 Tulisan ini menganalisis Putusan Nomor 460/K/AG/2019 dari perspektif nalar profetik dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum oleh nazhir perseorangan yang menelantarkan tanah wakaf. Putusan Mahkamah Agung tersebut dilatarbelakangi oleh gugatan penggantian nazhir perseorangan yakni YK dan DD yang diajukan oleh SA (nazhir badan hukum) dan KRA (ahli waris wakif). Dengan dasar pertimbangan surat pernyataan wakif tanggal 23 Mei 2013 tentang

penggantian nazhir perseorangan menjadi nazhir badan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis filosofis dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menguraikan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dan konsep keadilan transendental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung telah memenuhi prinsip-prinsip penalaran profetik. Selain itu, majelis hakim mempertimbangkan keabsahan formal penggantian nazhir perseorangan menjadi nazhir berbadan hukum dan prinsip-prinsip keadilan wakaf yang mengharuskan penggunaan tanah wakaf untuk pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial keagamaan. Prinsip-prinsip ini terkait dengan aspek ‘nilai’ dan ‘norma’. Mahkamah Agung memutuskan bahwa seorang nazhir perorangan telah bertindak secara ilegal karena aset wakaf tersebut telah disalahgunakan selama kurang lebih 28 tahun. Selain itu, nazhir perorangan juga dianggap lalai dan gagal memanfaatkan harta benda wakaf untuk tujuan yang diinginkan oleh wakif. Akibatnya, wakaf mengalami kerugian yang signifikan karena hilangnya potensi manfaat dari harta benda wakaf tersebut. Selain itu, keputusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengenai penggantian nazhir perseorangan menjadi nazhir berbadan hukum dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena tidak mengikuti prosedur yang benar. Keputusan tersebut didasarkan pada kontekstualisasi dari aspek sosio-religius, sosio-filosofis, dan sosio-kultural. (Isman, Syamsul Hidayat, & Risdayani) Kata kunci: nazhir; wakaf; penalaran profetik; keadilan transendental.	hukuman maksimal yang dapat diberikan. Hal ini berimplikasi pada semakin tergerusnya nilai keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Artikel ini menganalisis aspek normatif dalam Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama: (1) apakah aspek normatif yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dan majelis hakim dalam putusan tersebut telah diterapkan secara tepat; dan (2) sejauh mana efektivitas hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara optimal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam menentukan dakwaan dan tuntutan. Selain itu, kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi telah membatasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana maksimal terhadap terdakwa yang terbukti merugikan keuangan negara. Tidak adanya aturan yang secara jelas menetapkan batas kerugian negara sebagai dasar pemberian hukuman maksimum membuat ruang interpretasi hukum menjadi sempit. Akibatnya, penerapan sanksi pidana menjadi tidak konsisten dan melemahkan efek jera bagi pelaku korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan kualitas aparat penegak hukum serta penyempurnaan aturan hukum agar dapat mengimplementasikan hukuman maksimal bagi koruptor. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. (Diya Ul Akmal) Kata kunci: pemberantasan korupsi; konsep efektivitas hukum; pidana maksimal; pidana nihil.
Akmal DU (Magister Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia) Hukuman Maksimal Bagi Koruptor yang Mengakibatkan Kerugian Negara Kajian Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt. Pst <i>Jurnal Yudisial</i> 2024 17(3), 379-402 Permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Pada ranah penegakan hukum, koruptor dapat dengan mudah lolos dari	Hayatuddin K, Zahri S, Kurnianda SI, & Is MS (Magister Hukum Muhammadiyah Palembang dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, Indonesia) Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Kajian Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg <i>Jurnal Yudisial</i> 2024 17(3), 402-424 Artikel ini mengkaji Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg dengan fokus pada perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim. Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup dua aspek: <i>pertama</i>, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana; dan <i>kedua</i>, apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (<i>the best interests of the child</i>). Penelitian yang dilakukan merupakan studi hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak menerapkan mekanisme diversi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga anak langsung didakwa dan diadili, yang berpotensi melanggar hak-hak anak. Dalam aspek pertimbangan hukum, majelis hakim mendasarkan putusan pada pertimbangan yuridis, antara lain keterangan saksi, hasil <i>visum et repertum</i>, dakwaan jaksa penuntut umum, serta pemenuhan unsur-unsur delik. Di sisi lain, pertimbangan non-yuridis mencakup kondisi psikologis anak, latar belakang sosial, dan faktor yang meringankan maupun memberatkan. Namun, putusan belum sepenuhnya mencerminkan penerapan <i>ratio decidendi</i> secara holistik karena tidak memuat pendekatan filosofis dan sosiologis secara mendalam. Dengan demikian, diperlukan penguatan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif agar peradilan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada perlindungan dan rehabilitasi. (Khalisah Hayatuddin, Saipuddin Zahri, Satria Iman Kurnianda, dan Muhamad Sadi Is) Kata kunci: anak yang berkonflik dengan hukum; kepentingan terbaik bagi anak; diversi; <i>ratio decidendi</i>.	<i>Misinterpretasi</i> Hakim dalam Perkara Perdagangan Manusia Kajian Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg <i>Jurnal Yudisial</i> 2024 17(3), 425-446 Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang dilakukan oleh kelompok terorganisir dan melibatkan banyak pihak. Salah satu tantangan dalam menanganinya adalah bagaimana menafsirkan unsur-unsur tindak pidana secara tepat. Artikel ini membahas Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg, dengan fokus pada penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan analisis terhadap pertimbangan hukum majelis hakimnya. Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah: (1) bagaimana ketentuan hukum tentang perdagangan orang diterapkan jika tujuannya adalah eksploitasi di luar negeri; dan (2) apakah pertimbangan hakim dalam perkara ini sudah tepat dalam melihat unsur-unsur pidana dan peran terdakwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (hukum doktrinal), menggunakan pendekatan konseptual dan telaah peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim keliru dalam menafsirkan peran terdakwa sebagai bagian dari proses “perekrutan,” padahal terdakwa hanya “menerima berkas” permohonan paspor. Dalam hukum positif, unsur penting yang harus terbukti adalah tindakan “membawa” dengan maksud untuk eksploitasi. Jika unsur tersebut tidak jelas terbukti, maka dakwaan bisa tidak tepat. Unsur utama yang harus terpenuhi hanyalah “proses” yaitu “membawa” sebagai bagian dari “perekrutan” dan unsur tujuan “dengan maksud dieksploitasi.” Majelis hakim di dalam perkara a quo keliru dalam menafsirkan unsur tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan keluar wilayah Indonesia. Karena itu, penilaian hukum oleh hakim seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan berdasarkan fakta hukum yang kuat. Ketidaktepatan dalam menilai unsur tersebut berpotensi mengarah pada kekeliruan putusan.
Budiman AA (Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, Indonesia)	(Adhigama Andre Budiman) Kata Kunci: perdagangan orang; eksploitasi lintas negara; pertimbangan hukum.

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

Junaidi M (Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia)

The Authority to Address Written Recommendations of Industrial Relations Mediators

An Analysis of Decision Number 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.SBY and 55/G/2023/PTUN.SBY (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2024 17(3), 295-311

The Decisions of the Industrial Relations Court (PHI) Number 21/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.SBY and the Administrative Court (PTUN) Number 55/G/2023/PTUN.SBY have declared a lack of jurisdiction over disputes related to written recommendations issued by industrial relations mediators. This raises significant concerns regarding the exercise of judicial authority. Such a stance contradicts a fundamental principle in civil law systems, which asserts that courts should not refuse to examine, adjudicate, and resolve a case solely because the applicable law is unclear or absent. On the contrary, courts are obligated to fulfill their judicial responsibilities to ensure legal certainty and justice for the litigants involved. This analysis aims to explore the absolute competence of judicial bodies under the Supreme Court, in adjudicating claims arising from written recommendations issued by industrial relations mediators. The objective is to clarify which court holds jurisdiction over these disputes. Employing a normative legal approach, the study explores relevant statutory regulations. The findings indicate that while the issuance of written recommendations is situated within the legal framework of industrial relations, such recommendations are classified as administrative acts under state administrative law. They do not constitute judicial decisions, but administrative products created by state administrative officials. Consequently, any objections to the content of

such recommendations must be addressed through a claim filed with PTUN rather than the PHI. This analysis highlights the necessity for jurisdictional clarity to prevent judicial authority disputes and to protect the rights of those seeking justice.

(Muhammad Junaidi)

Keywords: written recommendations; industrial relations mediator; absolute competence; judicial authority disputes.

Hidayah NP (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia)

Refusal of Reconvention: The Implication of Prior Convention

An Analysis of Decision Number 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2024 17(3), 312-329

This study aims to analyse the judicial decision in a breach of contract lawsuit, in which the court essentially did not accept the defendant's reconvention lawsuit (niet ontvankelijke verklaard) on the grounds that the subject matter was different from that of the convention lawsuit, and/or because the panel of judges had already granted the convention lawsuit. The phrase "and/or" is used due to the absence of a clear and explicit rationale in the judgment for declaring the reconvention inadmissible. This research addresses the unclear legal basis of the judge's decision not to accept the reconvention lawsuit. This decision is inconsistent with statutory regulations and the doctrine of experts regarding civil procedural law. The main question addressed is how should the judicial reasoning be analysed in declaring the reconvention inadmissible in Decision Number 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. The research adopts a normative legal method, using both a conceptual and case approach, particularly

concerning the regulation of reconvention under civil procedural law. The findings reveal that the court rejected the reconvention solely on the basis that the convention was granted without reference to any legal norms or doctrine of experts. Convention and reconvention are independent lawsuits, not accessory in nature, and serve to uphold the principles of simple, prompt, and low-cost litigation and prevent conflicting judgments. Moreover, judges must provide clear and detailed reasoning for their decisions under fundamental principles of civil procedure. It is concluded that the judicial reasoning in the a quo case fails to reflect a proper application of civil procedural principles, particularly regarding the role of reconvention as a mechanism to promote procedural efficiency and legal consistency. (Nur Putri Hidayah) Keywords: convention; reconvention; joinder of lawsuits.	analytical research method and incorporates various approaches, including legal regulation, analysis of legal facts, and case studies. The objective is to explore potential regulations related to PKWTT through judicial reasoning and examine the role of concurring opinions in the decision-making process. The findings indicate that the judges adopted a legal realism approach in assessing the facts. The legal facts between employer and employee are classified as a PKWTT rather than a Fixed-Term Employment Contract (PKWT). The panel judge's differing view is a concurrent, not dissenting, opinion—agreeing on the PKWTT classification but differing on the amount of process wages—highlighting nuanced judicial interpretation in the case. (Supriyadi, Andi Intan Purnamasari, & Aminuddin Kasim) Keywords: concurrent opinion; indefinite-term employment contract; fixed-term employment contract; process wages.
Supriyadi, Purnamasari AI, & Kasim A (Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Indonesia) Examining Legal Considerations in Indefinite-Term Employment Contract Disputes An Analysis of Decision Number 47/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2024 17(3), 330-352 This article analyzes Decision Number 47/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr to examine the validity and fairness of the legal considerations undertaken by the panel of judges. The approach used is a textual analysis of the decision, focusing on procedural law, legal reasoning, and the consistency between the judges' rationale and the ruling's provisions. To focus on the analysis, three primary research questions were formulated. First, were the judge's considerations in Decision Number 47/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr appropriate and did they adequately serve the interests of justice for employees with Indefinite-Term Employment Contract (PKWTT); second, why were the differing opinions in the decision classified as concurring opinions. This study uses a descriptive-	Isman, Hidayat S, & Risdayani (Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia) Management Rights of Waqf and the Legal Liability of the Nazhir An Analysis of Decison Number 460/K/AG/2019 (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2024 17(3), 353-378 This article analyzes Decision Number 460/K/AG/2019 from the perspective of prophetic legal reasoning concerning the unlawful act committed by an individual, nazhir, who neglected waqf (Islamic endowment) property. The case arose from a lawsuit filed by SA (a legal-entity, nazhir) and KRA (heir of the wakif) seeking the replacement of individual nazhirs YK and DD. The claim was based on a written declaration by the wakif, dated May 23, 2013, which addressed the transition from an individual nazhir to an institutional nazhir. This study employs a juridical-philosophical methodology, utilizing a descriptive-analytical approach to examine the

Supreme Court’s legal reasoning and the concept of transcendental justice. The findings show that the Supreme Court’s legal considerations align with prophetic reasoning. The judges evaluated the validity of replacing an individual nazhir with a legal-entity nazhir. They upheld the principles of waqf justice, which state that waqf land must be used for educational, proselytization (dakwah), and religious social purposes. These principles focus on normative and value-based aspects. The Court determined that the nazhir unlawfully misused the waqf asset for about 28 years and was negligent in adhering to the wakif’s intent. This neglect caused significant losses to the waqf, depriving it of its intended social and religious benefits. Due to significant procedural errors, the Court has decisively annulled the Samarinda Religious High Court’s decision to replace the individual nazhir with a legal-entity nazhir. This ruling was based on a thorough contextual analysis addressing crucial socio-religious, philosophical, and cultural factors. (Isman, Syamsul Hidayat, & Risdayani) Keywords: nazhir; waqf (Islamic endowment); prophetic legal reasoning; transcendental justice.	the anti-corruption law is effectively implemented in practice. This research adopts a qualitative approach using a normative juridical method, with secondary data collected through a literature review. The findings reveal that the public prosecutor made significant errors in formulating charges and sentencing recommendations, which influenced the judges’ considerations and resulted in a minimal or non-existent sentence. Furthermore, regulatory shortcomings in anti-corruption legislation have constrained the court’s authority to impose maximum penalties on defendants, proven to have caused state financial losses. The absence of an explicit normative provision specifying thresholds of financial harm as a basis for maximum sentencing narrows the scope for legal interpretation. This leads to sentencing inconsistencies and diminishes the anti-corruption enforcement’s deterrent effect. Accordingly, improvements in prosecutorial quality and legal framework are necessary to support the imposition of maximum penalties. These reforms are essential to enhance the overall effectiveness of anti-corruption law enforcement. (Diya Ul Akmal) Keywords: anti-corruption enforcement; legal effectiveness; maximum penalty; prosecutorial errors.
Akmal DU (Magister Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia) Maximum Sentencing for State-Damaging Corruption An Analysis of Decision Number 50/Pid. SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2024 17(3), 379-402 The issue of corruption in Indonesia has become increasingly alarming. In law enforcement, corruptors often evade the imposition of maximum penalties, thereby eroding the public’s sense of justice. This article analyzes the normative aspects of Decision Number 50/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt. Pst. The study focuses on two key questions: (1) whether the normative framework applied by the public prosecutor and the panel of judges was appropriately implemented; and (2) to what extent	Hayatuddin K, Zahri S, Kurnianda SI, & Is MS (Magister Hukum Muhammadiyah Palembang dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, Indonesia) Protection of Children in Conflict with Law in Indonesia Based on Principles of Best Interest for Children An Analysis of Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2024 17(3), 403-424 This article examines Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg, focusing on the legal protection afforded to children in conflict with the law and the judicial considerations applied by the panel of

judges. The study addresses two main issues: first, the form and adequacy of legal protection provided to juvenile offenders, and second, whether the judicial reasoning in the decision aligns with the principle of the best interests of the child. This research adopts a normative legal approach with a descriptive-analytical method. The data used includes primary and secondary legal sources, which were analyzed qualitatively. The findings indicate that law enforcement authorities did not adhere to the diversion mechanism outlined in the Juvenile Criminal Justice System Law. Consequently, the child was subjected to direct prosecution and trial, which raises concerns regarding a potential violation of the child's rights. In terms of legal reasoning, the panel of judges based their ruling on juridical considerations, such as witness testimony, the medico-legal report (<i>visum et repertum</i>), the indictment by the public prosecutor, and the fulfillment of the elements of the offense. Meanwhile, non-juridical considerations included the child's psychological condition, social background, and mitigating and aggravating factors. However, the ruling does not fully reflect a comprehensive application of <i>ratio decidendi</i>, as it lacks an in-depth philosophical and sociological foundation. Therefore, it is essential to strengthen the implementation of restorative justice principles to ensure that juvenile justice is oriented toward punishment, protection, and rehabilitation. (Khalisah Hayatuddin, Saipuddin Zahri, Satria Iman Kurnianda, dan Muhamad Sadi Is) Keywords: children in conflict with the law; best interests of the child; diversion; <i>ratio decidendi</i>.	serious offense typically perpetrated by organized groups and involving multiple actors. A significant challenge in addressing these crimes is accurately interpreting the elements that define the offense. This article analyzed Decision Number 15/Pid. Sus/2017/PN.Kpg, with a particular emphasis on the application of Article 4 of Law Number 21 of 2007, which pertains to the eradication of human trafficking offenses. Additionally, the article assesses the judicial reasoning articulated by the panel of judges in the ruling. This study seeks to address two main questions: (1) how are legal provisions related to human trafficking enforced when the intended exploitation takes place in a foreign jurisdiction; and (2) did the judicial reasoning in this case sufficiently evaluate the pertinent elements of the offense and the defendant's role. Using a normative juridical approach, this research incorporates statutory interpretation and legal principles. The findings indicate that the court misinterpreted the defendant's role as part of the "recruitment" process, whereas her involvement was limited to receiving passport application documents. In positive law, specifically under Article 4 of Law Number 21 of 2007, a crucial element that must be established is the act of "transporting" with the intent to exploit. Without clear evidence of this, the ruling becomes legally questionable. The essential elements include the act of "transporting" as part of the recruitment process and the specific intent "to exploit." The panel of judges in this case failed to correctly interpret these transnational exploitation elements. Accurate judicial interpretation, grounded in legal facts and principles, is crucial. Therefore, misjudging these elements risks producing flawed decisions and undermining the integrity of the legal process. (Adhigama Andre Budiman) Keywords: human trafficking; transnational exploitation; legal consideration.
Budiman AA (Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, Indonesia) Judicial Misinterpretation in Human Trafficking Case An Analysis of Decision Number 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg (Org. Ind) <i>Jurnal Yudisial</i> 2024 17(3), 425-446 The criminal act of human trafficking constitutes a	